



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025**

## **DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA**

Jalan Ir. Soekarno Komplek Perkantoran G.obos Palangka Raya



WALI KOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
19. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.



2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025.
6. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2025.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

#### Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 dan belum tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

#### Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB VI : Penutup

#### BAB III

##### PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 dapat diubah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### BAB IV

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**ACHMAD ZAINI**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 16



## KATA PENGANTAR

Renja SOPD disusun oleh masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SOPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Dokumen Renja SOPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SOPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SOPD sangat ditentukan oleh kemampuan SOPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SOPD.

Demikian Renja Dinas Sosial Kota Palangka Raya disusun dengan memperhatikan Renstra Perangkat Daerah untuk pengimplementasian program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Palangka Raya, Oktober 2024

Kepala Dinas Sosial  
Kota Palangka Raya



H.RIDUAN, A.Md.Kep., SKM.M.M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711206 199403 1 006

DAFTAR ISI

|   |         |
|---|---------|
|   | halaman |
| SAMPUL DEPAN .....  | i       |
| KATA PENGANTAR .....  | ii      |
| DAFTAR ISI .....  | iii     |
| DAFTAR TABEL .....  | iv      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....   | v       |
| <br>BAB I PENDAHULUAN .....   | <br>1   |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1       |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 2       |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....  | 5       |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....  | 5       |
| <br>BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....   | <br>8   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu<br>Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 8       |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....   | 15      |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Perangkat Daerah.....                           | 15      |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....   | 15      |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....  | 28      |
| <br>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....  | <br>30  |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....  | 30      |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....   | 31      |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....  | 33      |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis .....                  | 34      |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....   | 35      |
| <br>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....   | <br>36  |
| <br>BAB V PENUTUP .....   | <br>62  |

DAFTAR TABEL

|   |         |
|---|---------|
|   | halaman |
| Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja & Capaian Renstra .....  | 8       |
| Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....   | 13      |
| Tabel 2.3 Perbandingan Program/Kegiatan Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan .....         | 17      |
| Tabel 3.1 Uraian Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja.....                              | 35      |
| Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ..... | 35      |



DAFTAR LAMPIRAN

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.1 | Rencana Aksi Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2025..... | 56 |
| 1.2 | SK Penetapan Renja .....                                     | -  |
| 1.3 | SK Penetapan Renja .....                                     | -  |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja PD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2025. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Palangka Raya dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang

dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Palangka Raya pada tahun 2025.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Renja Perubahan SOPD adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);



- 7) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- 10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi rancangan peraturan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan;

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
- 17) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
- 18) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
- 19) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
- 20) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
- 21) Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kota Palangka Raya; dan
- 22) Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1).

- 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Palangka Raya untuk satu tahun kedepan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah :

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis; dan
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kota Palangka Raya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah



Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SOPD tahun lalu, mengacu pada APBD tahun lalu yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SOPD.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SOPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SOPD dan hal yang terkait dengan pelayanan SOPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SOPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Subbab ini berisi uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arahkebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SOPD.

#### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD.

#### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Tahunan yang meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan dan Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Subbab ini berisi tentang rencana tata ruang yang berkaitan tentang Bidang Sosial.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Uraian garis besar tentang Kesejahteraan Sosial di Kota Palangka Raya

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahunan.

## BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Pelaksanaan Renja & Capaian Renstra**

| KODE              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)     | Target capaian kinerja Akhir RPJMD | Realisasi target kinerja s/d dengan tahun 2023 (tahun n-3) | Target dan Realisasi RKPD tahun 2023 (tahun n-2) |                                       |                       | Target program/ kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------|---|--|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------|--|---|--|-----------------------------------|
|                   |   |  |                                    |  | Target RKPD tahun 2023 (tahun n-2)               | Realisasi RKPD tahun 2023 (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi capaian s/d tahun 2024 (tahun berjalan / n-1)               | Tingkat capaian Realisasi s/d tahun 2024 (%) |                                   |
| 1                 | 2   | 3  | 4                                  | 5  | 6  | 7                                     | 8 (7/6)               | 9  | 10 (5+7+9)  | 11   | 12                                |
| <b>2001-06-01</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%) | 100                                | 100  | 100  | 0                                     | 0,0%                  | 0  | 100   | 100,0%                                       | Dinas Sosial                      |
| 1.06.01.2.01      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Persentase Dokumen SAKIP yang Terpenuhi (%)                | 500                                | 100  | 100  | 100                                   | 100,0%                | 25   | 225   | 45,0%  |                                   |
| 1.06.01.2.01.01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)              | 240                                | 13   | 6  | 13                                    | 216,7%                | 14   | 40  | 16,7%  |                                   |
| 1.06.01.2.01.07   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (Dokumen)         | 119                                | 25   | 7  | 25                                    | 357,1%                | 6  | 56  | 47,1%  |                                   |
| 1.06.01.2.02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | Persentase Laporan Keuangan yang Terpenuhi (%)             | 500                                | 100  | 100  | 100                                   | 100,0%                | 25   | 225   | 45,0%  |                                   |
| 1.06.01.2.02.01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah pegawai yang menerima gaji (Bulan)                  | 60                                 | 12   | 12   | 12                                    | 100,0%                | 3  | 27  | 45,0%  |                                   |
| 1.06.01.2.02.05   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             | Jumlah laporan akhir tahun (Laporan)                       | 11                                 | 1  | 1  | 1                                     | 100,0%                | 0  | 2   | 18,2%  |                                   |

|                 |  |   |        |       |       |       |        |    |       |       |  |
|-----------------|--|---|--------|-------|-------|-------|--------|----|-------|-------|--|
| 1.06.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>                             | Persentase SDM yang Disiplin dan Berkapasitas (%)   | 500    | 100   | 100   | 100   | 100,0% | 25 | 225   | 45,0% |  |
| 1.06.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                       | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut yang dibeli (orang)  | 300    | 60    | 60    | 60    | 100,0% | 0  | 120   | 40,0% |  |
| 1.06.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan formal dan pendidikan (Orang)                                       | 50     | 10    | 10    | 10    | 100,0% | 0  | 20    | 40,0% |  |
| 1.06.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi (%)   | 500    | 100   | 100   | 100   | 100,0% | 25 | 225   | 45,0% |  |
| 1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli (Jenis)  | 40     | 8     | 8     | 8     | 100,0% | 0  | 16    | 40,0% |  |
| 1.06.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah ATK yang dibeli (Item)   | 300    | 55    | 60    | 52    | 86,7%  | 0  | 107   | 35,7% |  |
| 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah barang yang dicetak dan digandakan (Lembar)  | 363490 | 21500 | 72698 | 21003 | 28,9%  | 0  | 42503 | 11,7% |  |
| 1.06.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli (Eksemplar)                            | 420    | 7     | 84    | 7     | 8,3%   | 0  | 14    | 3,3%  |  |
| 1.06.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah makanan dan minuman yang dibeli (Bulan)  | 60     | 12    | 12    | 12    | 100,0% | 3  | 27    | 45,0% |  |
| 1.06.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan Kedinasan Lainnya yang diadakan diluar daerah (bulan) | 60     | 12    | 12    | 12    | 100,0% | 3  | 27    | 45,0% |  |
| 1.06.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana (%)  | 500    | 100   | 100   | 100   | 100,0% | 0  | 200   | 40,0% |  |
| 1.06.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebeleur yang dibeli (Unit)  | 65     | 15    | 7     | 16    | 228,6% | 0  | 31    | 47,7% |  |
| 1.06.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli (Unit)                      | 32     | 2     | 7     | 2     | 28,6%  | 0  | 4     | 12,5% |  |
| 1.06.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli (Jenis)           | 23     | 7     | 4     | 7     | 175,0% | 0  | 14    | 60,9% |  |
| 1.06.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia (%)  | 500    | 100   | 100   | 100   | 100,0% | 25 | 225   | 45,0% |  |
| 1.06.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Rekening Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Setiap Bulan (Bulan)                               | 60     | 24    | 12    | 24    | 200,0% | 6  | 54    | 90,0% |  |
| 1.06.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar (bulan)   | 60     | 12    | 12    | 12    | 100,0% | 2  | 26    | 43,3% |  |



|  |   |   |     |     |     |     |        |    |     |        |              |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|--------|----|-----|--------|--------------|
| 1.06.01.2.09                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (%)   | 500 | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 25 | 225 | 45,0%  |              |
| 1.06.01.2.09.02                          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara (Unit)  | 44  | 8   | 9   | 8   | 88,9%  | 2  | 18  | 40,9%  |              |
| 1.06.01.2.09.09                          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (Unit)   | 10  | 2   | 2   | 2   | 100,0% | 0  | 4   | 40,0%  |              |
| 1.06.01.2.09.11                          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jenis perlengkapan gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara (Jenis)   | 50  | 10  | 10  | 10  | 100,0% | 0  | 20  | 40,0%  |              |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b> |   |   |     |     |     |     |        |    |     |        |              |
| <b>2001-06-02</b>                        | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>  | Persentase PSKS yang berkontribusi dalam proses penanganan PPKS (%)   | 80  | 80  | 80  | 0   | 0,0%   | 0  | 80  | 100,0% | Dinas Sosial |
| 1.06.02.2.02                             | <b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Persentase organisasi sosial/kelompok sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penertiban undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang (%)      | 325 | 25  | 65  | 20  | 30,8%  | 16 | 61  | 18,8%  |              |
| 1.06.02.2.02.01                          | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang            | Jumlah organisasi sosial/kelompok sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penertiban undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang (Organisasi) | 50  | 10  | 10  | 10  | 100,0% | 0  | 20  | 40,0%  |              |
| 1.06.02.2.03                             | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   | Persentase PSKS yang berkontribusi dalam proses penanganan PPKS (%)   | 440 | 100 | 80  | 100 | 125,0% | 20 | 220 | 50,0%  |              |
| 1.06.02.2.03.01                          | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Jumlah Peksos, PSM, dan Penyuluh sosial yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya (Orang)  | 395 | 75  | 79  | 75  | 94,9%  | 9  | 159 | 40,3%  |              |
| 1.06.02.2.03.02                          | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Jumlah TSKS yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya (Orang)  | 25  | 5   | 5   | 5   | 100,0% | 0  | 10  | 40,0%  |              |
| 1.06.02.2.03.04                          | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota      | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan (Orang)  | 75  | 120 | 15  | 15  | 100,0% | 0  | 135 | 180,0% |              |

|                   |   |  |     |     |    |    |        |    |     |        |              |
|-------------------|---|--|-----|-----|----|----|--------|----|-----|--------|--------------|
|                   |   | Jumlah PSKS kelembagaan yang mendapatkan pembinaan (Lembaga)                             | 150 | 30  | 30 | 30 | 100,0% | 5  | 65  | 43,3%  |              |
| 1.06.02.2.03.05   | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)   | Jumlah SDM LK3 yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam penanganan PPKS/PMKS (Orang) | 100 | 5   | 20 | 5  | 25,0%  | 0  | 10  | 10,0%  |              |
| <b>2001-06-04</b> | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)                                    | 50  | 100 | 50 | 0  | 0,0%   | 0  | 100 | 200,0% | Dinas Sosial |
| 1.06.04.2.01      | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial</b>    | Persentase PPKS SPM yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan (%)                         | 325 | 50  | 65 | 50 | 76,9%  | 16 | 116 | 35,7%  |              |
| 1.06.04.2.01.01   | Penyediaan Permakanan   | Jumlah PPKS SPM yang mendapat bantuan permakanan (Orang)                                 | 250 | 25  | 50 | 25 | 50,0%  | 0  | 50  | 20,0%  |              |
| 1.06.04.2.01.02   | Penyediaan Sandang  | Jumlah PPKS SPM yang mendapatkan bantuan sandang (Orang)                                 | 150 | 10  | 30 | 10 | 33,3%  | 0  | 20  | 13,3%  |              |
| 1.06.04.2.01.03   | Penyediaan Alat Bantu   | Jumlah PPKS SPM yang mendapatkan alat bantu (Orang)                                      | 19  | 5   | 2  | 5  | 250,0% | 0  | 10  | 52,6%  |              |
| 1.06.04.2.01.04   | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | Jumlah PPKS SPM yang bertemu dengan keluarganya kembali (Orang)                          | 75  | 10  | 15 | 10 | 66,7%  | 7  | 27  | 36,0%  |              |
| 1.06.04.2.01.05   | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Jumlah PPKS SPM yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial (Orang)    | 225 | 45  | 45 | 50 | 111,1% | 0  | 95  | 42,2%  |              |
| 1.06.04.2.01.06   | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumah PPKS yang keluarganya mendapat peningkatan pemahaman (Orang)                       | 75  | 30  | 15 | 50 | 333,3% | 2  | 82  | 109,3% |              |
| 1.06.04.2.01.12   | Pemberian Layanan Rujukan   | Jumlah PPKS SPM yang menerima layanan rujukan (Orang)                                    | 175 | 15  | 35 | 15 | 42,9%  | 0  | 30  | 17,1%  |              |
| 1.06.04.2.02      | <b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial</b>                       | Persentase PPKS non SPM yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan (%)                     | 325 | 50  | 65 | 50 | 76,9%  | 16 | 116 | 35,7%  |              |
| 1.06.04.2.02.07   | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Jumlah PPKS non SPM yang mendpatkan bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial (Orang) | 75  | 20  | 15 | 20 | 133,3% | 0  | 40  | 53,3%  |              |

|                   |  |  |        |       |       |       |        |     |       |        |              |
|-------------------|--|--|--------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|--------|--------------|
| 1.06.04.2.02.13   | Pemberian Layanan Rujukan  | Jumlah PPKS non SPM yang menerima layanan rujukan (Orang)  | 175    | 15    | 35    | 13    | 37,1%  | 1   | 29    | 16,6%  |              |
| <b>2001-06-05</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>   | Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial (%)   | 45     | 22,56 | 45    | 0     | 0,0%   | 0   | 22,56 | 50,1%  | Dinas Sosial |
| 1.06.05.2.02      | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                           | Persentase penerima bantuan sosial sesuai DTKS (%)   | 400    | 100   | 80    | 100   | 125,0% | 20  | 220   | 55,0%  |              |
| 1.06.05.2.02.01   | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah KK yang terverifikasi dan Validasi (KK)   | 54425  | 3500  | 10885 | 2680  | 24,6%  | 0   | 6180  | 11,4%  |              |
| 1.06.05.2.02.02   | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang menerima bantuan sosial (Orang)                                     | 220000 | 40954 | 44000 | 40954 | 93,1%  | 0   | 81908 | 37,2%  |              |
| 1.06.05.2.02.03   | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | Jumlah masyarakat rentan dan terdampak sosial yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Orang) | 7000   | 100   | 3500  | 100   | 2,9%   | 0   | 200   | 2,9%   |              |
| <b>2001-06-06</b> | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>  | Persentase Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)                                    | 80     | 100   | 80    | 0     | 0,0%   | 0   | 100   | 125,0% | Dinas Sosial |
| 1.06.06.2.01      | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>                     | Persentase korban bencana yang terpenuhinya kebutuhan dasar (%)  | 500    | 100   | 100   | 100   | 100,0% | 25  | 225   | 45,0%  |              |
| 1.06.06.2.01.01   | Penyediaan Makanan   | Jumlah korban bencana yang menerima bantuan pangan (Orang)   | 500    | 50    | 100   | 50    | 50,0%  | 94  | 194   | 38,8%  |              |
| 1.06.06.2.01.02   | Penyediaan Sandang   | Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sandang (Orang)  | 250    | 5     | 50    | 5     | 10,0%  | 0   | 10    | 4,0%   |              |
| 1.06.06.2.01.04   | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan   | Jumlah korban bencana yang menerima bantuan (Orang)  | 1000   | 50    | 200   | 50    | 25,0%  | 110 | 210   | 21,0%  |              |
| 1.06.06.2.02      | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> | Persentase petugas dan masyarakat yang mampu menaggulangi bencana (%)  | 500    | 100   | 100   | 100   | 100,0% | 25  | 225   | 45,0%  |              |
| 1.06.06.2.02.02   | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                 | Jumlah TAGANA yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang)   | 25     | 12    | 0     | 12    | 0,0%   | 5   | 29    | 116,0% |              |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai lembaga untuk mampu berperan sebagai pelaksana urusan wajib pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Dalam Urusan Wajib Sosial menyelenggarakan fungsi Bidang Kesejahteraan Sosial, Pengelolaan pembinaan sosial, pengelolaan pemulihan sosial, pengelolaan pembinaan bantuan dan perlindungan sosial.

Sejalan dengan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Dinas Sosial Kota palangka Raya sebagai lembaga teknis pelaksanaan pelayanan mempunyai target dan realisasi sesuai dengan pelayanan SPM, sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Indikator   | SPM/Standar nasional   | IKK   | Target Renstra Perangka Daerah |       |       |       | Realisasi Capaian |         | Proyeksi |       | Catatan Analisis  |
|----|---|--|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|---------|----------|-------|---|
|    |   |  |   | Tahun                          |       |       |       |                   |         |          |       |   |
|    |   |  |   | (n-2)                          | (n-1) | (n)   | (n+1) | (n-2)             | (n-1)   | (n)      | (n+1) |   |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                              | 6     | 7     | 8     | 9                 | 10      | 11       | 12    | 13  |
| 1  | Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                     | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti                | Persentase Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 %                          | 100 % | 100 % | 100%  | 100 %             | 91,38 % | 100 %    | 100%  | Pemenuhan indikator pendukung (output) yang menjadi pendorong pencapaian indikator utama (outcome) sesuai dengan pemenuhan indikator bidang sosial menurut perundang-undangan |
| 2  | Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti   | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti                                  |   |                                |       |       |       |                   |         |          |       |   |
| 3  | Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                       | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti                           |   |                                |       |       |       |                   |         |          |       |   |
| 4  | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti |   |                                |       |       |       |                   |         |          |       |   |

|   |   |  |   |       |       |       |      |       |      |       |      |  |
|---|---|--|---|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|--|
| 5 | Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | 100% | 100 % | 100% | Ketercapaian penanganan korban bencana disesuaikan dengan kebutuhan dari korban bencana alam dan sosial serta kejadian bencana |
|---|---|--|---|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|--|

Dalam penerapan layanan tersebut telah dilakukan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disesuaikan dan dianalisis berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provnsi dan Daerah Kabupaten/Kota;dan
3. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 Tentang RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026.

Indikator-indikator yang dapat dipenuhi untuk mendukung dan melaksanakan pelayanan masyarakat pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya, yaitu :

1. Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS;
2. Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya;
3. Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial; dan
4. Peresentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya.



### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya Dinas Sosial Kota Palangka Raya khususnya dalam Penurunan jumlah PMKS mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kementerian Sosial RI. Dimana fungsi tugas pokoknya adalah masalah Sosial yang cakupannya luas, baik itu pelayanan jaminan sosial masyarakat, pelatihan keterampilan anak terlantar dan PKH dan pelatihan bagi KUBE serta kesiapsiagaan bencana.

Banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya disamping keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, SDM yang masih kurang mendapatkan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi serta pengalaman yang masih terbatas sehingga ada beberapa fungsi dan tugas yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal, namun patut disyukuri program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada umumnya berjalan dengan baik sehingga visi dan misi Kepala Daerah terhadap Program Nasional dapat dicapai walaupun belum maksimal.

Untuknya kedepannya Dinas Sosial berharap dapat menangkap peluang dan tantangan dalam era globalisasi yang menuntut keahlian dan pengalaman yang tinggi untuk dapat mencapai program kerja yang diharapkan sehingga program pelayanan bagi masyarakat dapat lebih maksimal dan diharapkan bidang Sosial menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintah dalam capaian Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Palangka Raya. Untuk itu, perlu dikembangkan program pelatihan bagi PMKS yang banyak diminati masyarakat.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya disusun dengan memperhatikan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022. RPD juga menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD.

Program dan kegiatan prioritas daerah merupakan substansi RKPD Kota Palangka Raya, daftar yang disajikan meliputi nama program dan kegiatan yang diwujudkan dalam jumlah dana yang dibutuhkan, target dari pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan untuk RKPD Kota Palangka Raya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk penyelesaian target-target pembangunan nasional;
2. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya;
3. Fokus pada RPJPD 2008-2028 dan indikator kinerja RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
4. Memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;
5. Mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah;
6. Pemerataan antar kecamatan dan atau kelurahan;
7. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
8. Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum;
9. Relevan terhadap isi strategis dan masalah mendesak pada masing-masing misi pembangunan yang faktual; dan
10. Program dan kegiatan terpilih menyentuh langsung bagi upaya pemecahan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.

Untuk itu, Dinas Sosial Kota Palangka Raya berkaitan dengan Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada RKPD dan RPJM Pemerintah Kota Palangka Raya. Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Dinas Sosial Kota Palangka Raya merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Program/Kegiatan Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan**

| Rancangan Awal RKPD |  |                    |  |                 |                     | Hasil Analisis Kebutuhan   |                    |  |                 |                     |
|---------------------|--|--------------------|--|-----------------|---------------------|--|--------------------|--|-----------------|---------------------|
| No                  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Lokasi             | Indikator Kinerja  | Target Capaian  | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Lokasi             | Indikator Kinerja  | Target Capaian  | Pagu Indikatif (Rp) |
|                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      | Kota Palangka Raya | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan   | 100%            | 6,758,593,190       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      | Kota Palangka Raya | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan   | 100%            | 6,758,593,190       |
|                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Palangka Raya | Persentase Dokumen SAKIP yang Terpenuhi  | 100%            | 50,452,500          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Palangka Raya | Persentase Dokumen SAKIP yang Terpenuhi  | 100%            | 50,452,500          |
|                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Kota Palangka Raya | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 8 Dokumen       | 24,902,000          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Kota Palangka Raya | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 8 Dokumen       | 24,902,000          |
|                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Kota Palangka Raya | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan       | 25,550,000          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Kota Palangka Raya | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan       | 25,550,000          |
|                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Kota Palangka Raya | Persentase Laporan Keuangan yang Terpenuhi   | 100%            | 4,637,726,688       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Kota Palangka Raya | Persentase Laporan Keuangan yang Terpenuhi   | 100%            | 4,637,726,688       |
|                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Kota Palangka Raya | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar  | 50 Orang/ Bulan | 4,611,894,236       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Kota Palangka Raya | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar  | 50 Orang/ Bulan | 4,611,894,236       |
|                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Kota Palangka Raya | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan       | 25,832,452          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Kota Palangka Raya | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan       | 25,832,452          |

|  |  |                           |   |             |                    |  |                           |   |             |                    |
|--|--|---------------------------|---|-------------|--------------------|--|---------------------------|---|-------------|--------------------|
|  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Persentase SDM yang Disiplin dan Berkapasitas</b>                                | <b>100%</b> | <b>100,925,000</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Persentase SDM yang Disiplin dan Berkapasitas</b>                                | <b>100%</b> | <b>100,925,000</b> |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket     | 65,925,000         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket     | 65,925,000         |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang     | 35,000,000         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang     | 35,000,000         |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi</b>                      | <b>100%</b> | <b>449,617,378</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi</b>                      | <b>100%</b> | <b>518,117,378</b> |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 paket     | 6,073,803          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket     | 6,073,803          |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 5 Paket     | 60,000,000         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 5 paket     | 60,000,000         |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 3 Paket     | 32,487,094         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 3 Paket     | 32,487,094         |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 12 Dokumen  | 12,663,985         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 12 Dokumen  | 12,663,985         |

|  |  |                    |  |            |             |  |                    |  |            |             |
|--|--|--------------------|--|------------|-------------|--|--------------------|--|------------|-------------|
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kota Palangka Raya | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 12 Laporan | 31,922,485  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kota Palangka Raya | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 12 Laporan | 31,922,485  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Kota Palangka Raya | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan | 440,000,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Kota Palangka Raya | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan | 440,000,000 |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Kota Palangka Raya | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana                                       | 100%       | 198,750,000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Kota Palangka Raya | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana                                       | 100%       | 248,750,000 |
|  | Pengadaan Mebel  | Kota Palangka Raya | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 8 Unit     | 98,750,000  | Pengadaan Mebel  | Kota Palangka Raya | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 7 Unit     | 68,750,000  |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Kota Palangka Raya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 2 Unit     | 55,000,000  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Kota Palangka Raya | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 2 Unit     | 45,000,000  |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Palangka Raya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 8 Unit     | 90,000,000  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Palangka Raya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit     | 50,000,000  |



|  |  |                           |  |             |                    |  |                           |  |             |                    |
|--|--|---------------------------|--|-------------|--------------------|--|---------------------------|--|-------------|--------------------|
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia</b>  | <b>100%</b> | <b>619,498,787</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia</b>  | <b>100%</b> | <b>819,498,787</b> |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan  | 103,760,000        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan  | 103,760,000        |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan  | 494,238,616        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan  | 494,238,616        |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang Terplihara</b>  | <b>100%</b> | <b>166,000,000</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang Terplihara</b>  | <b>100%</b> | <b>268,000,000</b> |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny    | 9 Unit      | 110,000,000        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny    | 9 Unit      | 110,000,000        |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 2 Unit      | 40,000,000         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 2 Unit      | 40,000,000         |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Jenis     | 18,193,519         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | <b>Kota Palangka Raya</b> | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Jenis     | 18,193,519         |

|  |   |                           |   |                   |                    |   |                           |   |                   |                    |
|--|---|---------------------------|---|-------------------|--------------------|---|---------------------------|---|-------------------|--------------------|
|  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>  | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS</b>  | <b>80%</b>        | <b>102,079,997</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>  | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS</b>  | <b>80%</b>        | <b>102,079,997</b> |
|  | <b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Persentase Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b> | <b>100%</b>       | <b>21,900,000</b>  | <b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Persentase Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b> | <b>100%</b>       | <b>21,900,000</b>  |
|  | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b> | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b>                                  | <b>12 Dokumen</b> | <b>21,900,000</b>  | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b> | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b>                                  | <b>12 Dokumen</b> | <b>21,900,000</b>  |
|  | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS</b>  | <b>80%</b>        | <b>91,781,000</b>  | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS</b>  | <b>80%</b>        | <b>91,781,000</b>  |
|  | <b>Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                    | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>  | <b>60 Orang</b>   | <b>40,169,000</b>  | <b>Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                    | <b>Kota Palangka Raya</b> | <b>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>  | <b>60 Orang</b>   | <b>137,000,000</b> |

|  |  |                    |   |            |             |  |                    |   |            |             |
|--|--|--------------------|---|------------|-------------|--|--------------------|---|------------|-------------|
|  | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kota Palangka Raya | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                 | 5 Orang    | 5,000,000   | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kota Palangka Raya | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang    | 25,015,200  |
|  | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palangka Raya | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota  | 30 Lembaga | 35,500,000  | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kota Palangka Raya | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | 55 Lembaga | 65,500,000  |
|  | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)  | Kota Palangka Raya | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang   | 11,112,000  | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)  | Kota Palangka Raya | Jumlah SDM LK3 yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam penanganan PPKS/PMKS  | 0          | 0           |
|  | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | Kota Palangka Raya | Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya   | 50%        | 313,291,600 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | Kota Palangka Raya | Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya   | 50%        | 313,291,600 |
|  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Kota Palangka Raya | Persentase PPKS SPM yang Mendapatkan Pelayanan dan Pembinaan  | 65%        | 272,432,400 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Kota Palangka Raya | Persentase PPKS SPM yang Mendapatkan Pelayanan dan Pembinaan  | 65%        | 272,432,400 |

|  |   |                    |  |          |            |   |                    |  |           |            |
|--|---|--------------------|--|----------|------------|---|--------------------|--|-----------|------------|
|  | Penyediaan Permakanan   | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota  | 50 Orang | 35,950,000 | Penyediaan Permakanan   | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota  | 100 Orang | 75,550,000 |
|  | Penyediaan Sandang  | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota   | 40 Orang | 14,950,000 | Penyediaan Sandang  | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota   | 40 Orang  | 14,950,000 |
|  | Penyediaan Alat Bantu   | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 4 Orang  | 10,150,000 | Penyediaan Alat Bantu   | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 4 Orang   | 12,000,000 |
|  | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | 15 Orang | 40,000,000 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | 15 Orang  | 40,000,000 |
|  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Kota Palangka Raya | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota   | 45 Orang | 50,900,000 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Kota Palangka Raya | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota   | 45 Orang  | 50,900,000 |
|  | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Kota Palangka Raya | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 7,900,000  | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Kota Palangka Raya | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang  | 7,375,000  |
|  | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak  | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota        | 35 Orang | 5,000,000  | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak  | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota        | 35 Orang  | 5,000,000  |

|  |   |                    |   |           |            |   |                    |   |           |            |
|--|---|--------------------|---|-----------|------------|---|--------------------|---|-----------|------------|
|  | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang  | 15,000,000 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang  | 15,000,000 |
|  | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan  | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                      | 100 Orang | 10,000,000 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan  | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                      | 100 Orang | 10,000,000 |
|  | Pemberian Layanan Kedaruratan   | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                           | 30 Orang  | 15,000,000 | Pemberian Layanan Kedaruratan   | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                           | 30 Orang  | 15,000,000 |
|  | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 10 Orang  | 10,000,000 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 10 Orang  | 10,000,000 |
|  | Pemberian Layanan Rujukan   | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                      | 35 Orang  | 10,308,200 | Pemberian Layanan Rujukan   | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                      | 35 Orang  | 10,308,200 |
|  | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Kota Palangka Raya | Persentase PPKS non SPM yang Mendapatkan Pelayanan dan Pembinaan  | 65%       | 40,859,200 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Kota Palangka Raya | Persentase PPKS non SPM yang Mendapatkan Pelayanan dan Pembinaan  | 65%       | 40,859,200 |
|  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Kota Palangka Raya | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 25 Orang  | 10,500,000 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Kota Palangka Raya | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 25 Orang  | 10,500,000 |



|  |   |                    |   |              |               |   |                    |   |              |               |
|--|---|--------------------|---|--------------|---------------|---|--------------------|---|--------------|---------------|
|  | Pemberian Layanan Rujukan                                   | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 10 Orang     | 8,051,000     | Pemberian Layanan Rujukan                                   | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 10 Orang     | 8,051,000     |
|  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     | Kota Palangka Raya | Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial  | 45%          | 1,107,000,000 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     | Kota Palangka Raya | Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial  | 45%          | 1,153,500,000 |
|  | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                            | Kota Palangka Raya | Persentase Anak Terlantar yang Terplihara   | 0            | 0             | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                            | Kota Palangka Raya | Persentase Anak Terlantar yang Terplihara   | 100%         | 15,000,000    |
|  | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | Kota Palangka Raya | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota  | 0            | 0             | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | Kota Palangka Raya | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota  | 10 Orang     | 15,000,000    |
|  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Palangka Raya | Persentase Penerima Bantuan Sosial Sesuai DTKS  | 80%          | 1,107,000,000 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Palangka Raya | Persentase Penerima Bantuan Sosial Sesuai DTKS  | 80%          | 1,153,500,000 |
|  | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        | Kota Palangka Raya | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata   | 21.955 Orang | 30,500,000    | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        | Kota Palangka Raya | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata   | 21.955 Orang | 55,500,000    |
|  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Palangka Raya | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota  | 300KK        | 76,500,000    | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Palangka Raya | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota  | 0            | 0             |
|  | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga            | Kota Palangka Raya | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 17.904 KK    | 1,000,000,000 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga            | Kota Palangka Raya | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 17.904 KK    | 1,065,000,000 |

|  |   |                    |   |           |               |   |                    |   |            |               |
|--|---|--------------------|---|-----------|---------------|---|--------------------|---|------------|---------------|
|  | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | 50 Orang  | 50,000,000    | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | 50 Orang   | 50,000,000    |
|  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | Kota Palangka Raya | Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya   | 80%       | 1,068,544,288 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | Kota Palangka Raya | Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya   | 80%        | 1,101,544,288 |
|  | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Kota Palangka Raya | Persentase Korban Bencana yang terpenuhinya Kebutuhannya  | 100%      | 1,047,996,002 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Kota Palangka Raya | Persentase Korban Bencana yang terpenuhinya Kebutuhannya  | 100%       | 1,055,996,002 |
|  | Penyediaan Makanan  | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  | 800 Orang | 37,996,000    | Penyediaan Makanan  | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  | 1000 Orang | 40,996,000    |
|  | Penyediaan Sandang  | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 500 Orang | 15,000,000    | Penyediaan Sandang  | Kota Palangka Raya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 500 Orang  | 15,000,0000   |
|  | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                           | Kota Palangka Raya | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota   | 2 Unit    | 16,000,000    | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                           | Kota Palangka Raya | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota   | 2 Unit     | 16,000,000    |
|  | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                            | Kota Palangka Raya | Jumlah Korban Bencana yang menerima Bantuan   | 200 Orang | 1,000,000,000 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                            | Kota Palangka Raya | Jumlah Korban Bencana yang menerima Bantuan   | 200 Orang  | 1,000,000,000 |

|       |   |                    |  |           |               |   |                    |  |           |            |               |
|-------|---|--------------------|--|-----------|---------------|---|--------------------|--|-----------|------------|---------------|
|       | Pelayanan Dukungan Psikososial  | Kota Palangka Raya | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                            | 200 Orang | 16,000,000    | Pelayanan Dukungan Psikososial  | Kota Palangka Raya | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                            | 200 Orang | 16,000,000 |               |
|       | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Kota Palangka Raya | Persentase Petugas dan Masyarakat yang mampu menaggulangi bencana  | 100%      | 20,548,286    | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Kota Palangka Raya | Persentase Petugas dan Masyarakat yang mampu menaggulangi bencana  | 100%      | 45,548,286 |               |
|       | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                         | Kota Palangka Raya | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Kampung | 10,000,000    | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                         | Kota Palangka Raya | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Kampung | 10,000,000 |               |
|       | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          | Kota Palangka Raya | Jumlah TAGANA yang mendapatkan peningkatan Kapasitas   | 25 Orang  | 20,548,286    | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          | Kota Palangka Raya | Jumlah TAGANA yang mendapatkan peningkatan Kapasitas   | 25 Orang  | 45,548,286 |               |
| TOTAL |   |                    |  |           | 8,741,914,855 | TOTAL   |                    |  |           |            | 8,741,914,855 |

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial Kota Palangka Raya hanya menerima Usulan Musawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) kelurahan saja tidak masuk kriteria untuk lanjut ditingkat Kecamatan dan masuk ketingkat OPD.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial maka tujuan pelaksanaan dari penjabaran visi dan misi untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita rencana kerja Dinas adalah:

#### **a. Tujuan**

Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari RPD, dimana melalui pernyataan tujuan ini dapat memperjelas. Sesuai kewenangan yang



dimiliki Dinas Sosial Kota Palangka Raya tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan sosial di bidang kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (aparatur) yang handal sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
4. Meningkatkan prasarana dan sarana aparatur;dan
5. Mewujudkan pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Sosial dan Kota Palangka Raya.

**b. Sasaran**

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah :

1. Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
3. Terwujudnya kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat;
4. Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur.
6. Meningkatnya prasarana dan sarana aparatur yang memadai;
7. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
8. Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;dan
9. Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana;

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai tindak lanjut perumusan kebijaksanaan. Penetapan Program merupakan program pokok yang ditetapkan secara selektif dalam substansi strategi pencapaian tujuan dan sasaran dari Dinas Sosial Kota Palangkaraya.

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Pemberdayaan Sosial
- 3. Program Rehabilitasi Sosial
- 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 5. Program Penanganan Bencana

Berdasarkan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2023 yang mengacu pada RPD tahun 2024-2026 mempunyai target capaian indikator kinerja yang harus tercapai adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Uraian Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

| SASARAN STRATEGIS |                              | INDIKATOR KINERJA |   | Target | PROGRAM & KEGIATAN PENDUKUNG  |
|-------------------|------------------------------|-------------------|---|--------|---|
|                   |                              | URAIAN            |   |        |   |
| 1                 | Meningkatnya Penanganan PPKS | 1                 | Persentase PPKS yang Berfungsi Sosial                           | 3.5%   | 1. Program Pemberdayaan Sosial<br>2. Program Rehabilitasi Sosial<br>3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>4. Program Penanganan Bencana   |
|                   |                              | 2                 | Persentase PSKS yang Berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS | 100%   | 1. Program Pemberdayaan Sosial<br>a) Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.<br>b) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.   |
|                   |                              | 3                 | Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya               | 100%   | 1. Program Rehabilitasi Sosial<br>a) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.<br>b) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids |

| SASARAN STRATEGIS |  | INDIKATOR KINERJA |   | Target | PROGRAM & KEGIATAN PENDUKUNG   |
|-------------------|--|-------------------|---|--------|--|
|                   |  | URAIAN            |   |        |  |
|                   |  |                   |   |        | dan Napza di Luar Panti Sosial   |
|                   |  | 4                 | Persentase Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Sosial                        | 9.5%   | 1. Program Perlindungan & Jaminan Sosial<br>a) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  |
|                   |  | 5                 | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasar | 100%   | 1. Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota<br>a) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota<br>b) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada aspek sosial Kota Palangka Raya memiliki permasalahan di bidang kemiskinan, pendidikan dan kesehatan sehingga dijadikan isu strategis prioritas. Permasalahan kemiskinan meskipun secara kuantitas terus menurun, akan tetapi masih terdapat kantong-kantong kemiskinan di kawasan kumuh dan padat dengan angka pengangguran terselubung yang tinggi (produktivitas tenaga kerja yang rendah).

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas dari indikator pilar sosial adalah membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan, mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana serta menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya Pada tahun Anggaran 2024, antara lain :

1. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat khususnya PPKS masih rendah;
2. Cakupan pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial belum merata;
3. Masih lemahnya penanganan bencana, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat khususnya PPKS;
4. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain;
5. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor masih belum optimal;
6. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan pelayanan aparatur; dan
7. Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu, data penerima bantuan, dan data PPKS yang masih belum dilakukan secara terintegrasi;

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD), Dinas Sosial Kota Palangka

Raya merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026**

| Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program<br>/ Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |   |  | Rencana Tahun 2025                                 |                        |                       |                |                      | Catatan Penting                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |   |                  |                                     |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|---|--|--|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|
|      |    |    |      |      |   | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan                       | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan                             | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja                      |                  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |    |    |      |      |   |                   |   |  |  | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |                                   | Tolok Ukur                                  | Target           |                                     |
|      |    |    |      |      |   |                   |   |  |  |                        |                       |                |                      |                                      |                                   |   |                  |                                     |
|      |    |    |      |      | Dinas Sosial  |                   |   |  |  |                        |                       |                | 11.540.796.722,00    |                                      |                                   |   | 9.323.944.594,00 |                                     |
| 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                   |   |  |  |                        |                       |                | 11.540.796.722,00    |                                      |                                   |   | 9.323.944.594,00 |                                     |
| 1    | 06 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                   |                   |   |  |  |                        |                       |                | 11.540.796.722,00    |                                      |                                   |   | 9.323.944.594,00 |                                     |
| 1    | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         |                   |   |  |  |                        |                       |                | 7.782.746.922,00     |                                      |                                   |   | 6.879.859.744,00 |                                     |
| 1    | 06 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    |                   |   |  |  |                        |                       |                | 48.991.119,00        |                                      |                                   |   | 35.756.500,00    |                                     |
| 1    | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     |                   |   |  |  |                        |                       |                |                      |                                      |                                   |   |                  |                                     |
|      |    |    |      |      |   | -                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah<br>Persentase terpenuhinya dokumen SAKIP yang memadai | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                      | 3 Dokumen             | 100 %<br>100 % | 27.691.119,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen        | 15.000.000,00                       |
| 1    | 06 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                   |   |  |  |                        |                       |                |                      |                                      |                                   |   |                  |                                     |

|   |    |    |      |      |   |  |  |  |   |                |                |                  |                                      |  |  |                |                  |
|---|----|----|------|------|---|--|--|--|---|----------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--|--|----------------|------------------|
|   |    |    |      |      | -   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah<br>Persentase terpenuhinya dokumen SAKIP yang memadai | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 3 Laporan      | 100 %<br>100 % | 21.300.000,00    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan      | 20.756.500,00    |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      |  |  |  |   |                |                | 5.061.079.747,00 |                                      |  |  |                | 5.136.203.025,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           |  |  |  |   |                |                |                  |                                      |  |  |                |                  |
|   |    |    |      |      | -   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah   | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 50 Orang/bulan | 100 %          | 5.024.548.347,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 50 Orang/bulan | 5.110.370.625,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |  |  |   |                |                |                  |                                      |  |  |                |                  |
|   |    |    |      |      | -   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah   | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 3 Laporan      | 100 %          | 36.531.400,00    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan      | 25.832.400,00    |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   |  |  |  |   |                |                | 159.750.000,00   |                                      |  |  |                | 159.557.500,00   |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya      |  |  |  |   |                |                |                  |                                      |  |  |                |                  |
|   |    |    |      |      | -   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | -  | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 60 Paket       | -              | 58.750.000,00    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 60 Paket       | 140.925.000,00   |



|   |    |    |      |      |  |   |   |   |  |   |         |   |                |                                      |  |   |         |                |
|---|----|----|------|------|--|---|---|---|--|---|---------|---|----------------|--------------------------------------|--|---|---------|----------------|
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |   |   |   |  |   |         |   |                |                                      |  |   |         |                |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 4 Orang | - | 101.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | 18.632.500,00  |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |   |   |   |  |   |         |   | 934.351.156,00 |                                      |  |   |         | 596.449.800,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |   |   |  |   |         |   |                |                                      |  |   |         |                |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 1 Paket | - | 23.131.500,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket | 12.083.500,00  |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |   |   |  |   |         |   |                |                                      |  |   |         |                |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 2 Paket | - | 190.210.400,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 2 Paket | 48.414.400,00  |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |   |   |   |  |   |         |   |                |                                      |  |   |         |                |

|   |    |    |      |      |  |   |  |   |  |   |            |   |                |                                      |  |  |            |                |
|---|----|----|------|------|--|---|--|---|--|---|------------|---|----------------|--------------------------------------|--|--|------------|----------------|
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 4 Paket    | - | 108.200.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | 4 Paket    | 48.414.400,00  |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |   |  |   |  |   |            |   |                |                                      |  |  |            |                |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 12 Dokumen | - | 15.800.000,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 10.800.000,00  |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |   |  |   |  |   |            |   |                |                                      |  |  |            |                |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 12 Laporan | - | 129.009.256,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 12 Laporan | 38.737.500,00  |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |   |  |   |  |   |            |   |                |                                      |  |  |            |                |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 12 Laporan | - | 468.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan | 438.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |  |   |  |   |            |   | 103.923.000,00 |                                      |  |  |            | 162.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel  |   |  |   |  |   |            |   |                |                                      |  |  |            |                |

|   |    |    |      |      |  |   |  |   |  |   |        |   |                  |                                      |  |  |        |                |
|---|----|----|------|------|--|---|--|---|--|---|--------|---|------------------|--------------------------------------|--|--|--------|----------------|
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 2 Unit | - | 27.660.000,00    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 2 Unit | 12.000.000,00  |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |   |  |   |  |   |        |   |                  |                                      |  |  |        |                |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 3 Unit | - | 56.263.000,00    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 3 Unit | 50.000.000,00  |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  |   |  |   |        |   |                  |                                      |  |  |        |                |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 1 Unit | - | 20.000.000,00    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 100.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |   |  |   |  |   |        |   | 1.016.095.600,00 |                                      |  |  |        | 541.948.400,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |   |  |   |  |   |        |   |                  |                                      |  |  |        |                |

|   |    |    |      |      |   |   |  |   |  |   |            |   |                |                                      |  |  |            |                |
|---|----|----|------|------|---|---|--|---|--|---|------------|---|----------------|--------------------------------------|--|--|------------|----------------|
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 12 Laporan | - | 136.795.600,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan | 73.142.400,00  |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |  |   |  |   |            |   |                |                                      |  |  |            |                |
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 12 Laporan | - | 879.300.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan | 468.806.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |  |   |  |   |            |   | 458.556.300,00 |                                      |  |  |            | 247.944.519,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |  |   |  |   |            |   |                |                                      |  |  |            |                |
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 9 Unit     | - | 331.306.300,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit     | 199.751.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  |   |  |   |            |   |                |                                      |  |  |            |                |

|   |    |    |      |      |  |   |   |   |  |   |            |   |                |                                      |  |   |            |                |
|---|----|----|------|------|--|---|---|---|--|---|------------|---|----------------|--------------------------------------|--|---|------------|----------------|
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 2 Unit     | - | 80.000.000,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 2 Unit     | 30.000.000,00  |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya         |   |   |   |  |   |            |   |                |                                      |  |   |            |                |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                  | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 12 Unit    | - | 47.250.000,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                  | 12 Unit    | 18.193.519,00  |
| 1 | 06 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  |   |   |   |  |   |            |   | 266.920.000,00 |                                      |  |   |            | 104.050.600,00 |
| 1 | 06 | 02 | 2.02 |      | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota  |   |   |   |  |   |            |   | 9.000.000,00   |                                      |  |   |            | 15.356.200,00  |
| 1 | 06 | 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang |   |   |   |  |   |            |   |                |                                      |  |   |            |                |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 12 Dokumen | - | 9.000.000,00   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 12 Dokumen | 15.356.200,00  |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 |      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                               |   |   |   |  |   |            |   | 257.920.000,00 |                                      |  |   |            | 88.694.400,00  |

|   |    |    |      |      |  |   |   |   |  |   |          |   |                |                                      |  |   |          |               |
|---|----|----|------|------|--|---|---|---|--|---|----------|---|----------------|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                          |   |   |   |  |   |          |   |                |                                      |  |   |          |               |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 40 Orang | - | 100.870.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 40 Orang | 20.194.400,00 |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              |   |   |   |  |   |          |   |                |                                      |  |   |          |               |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 5 Orang  | - | 10.000.000,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang  | 18.500.000,00 |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |   |   |   |  |   |          |   |                |                                      |  |   |          |               |

|   |    |    |      |      |  |   |   |   |  |   |            |   |                |                                      |  |   |            |                |
|---|----|----|------|------|--|---|---|---|--|---|------------|---|----------------|--------------------------------------|--|---|------------|----------------|
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                              | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 70 Lembaga | - | 147.050.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                              | 70 Lembaga | 50.000.000,00  |
| 1 | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  |   |   |   |  |   |            |   | 737.460.600,00 |                                      |  |   |            | 560.283.050,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |   |   |   |  |   |            |   | 611.840.600,00 |                                      |  |   |            | 548.383.050,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan  |   |   |   |  |   |            |   |                |                                      |  |   |            |                |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 115 Orang  | - | 406.900.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 115 Orang  | 240.300.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang   |   |   |   |  |   |            |   |                |                                      |  |   |            |                |



|   |    |    |      |      |  |   |  |   |  |   |          |   |               |                                      |  |  |          |               |
|---|----|----|------|------|--|---|--|---|--|---|----------|---|---------------|--------------------------------------|--|--|----------|---------------|
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 60 Orang | - | 32.756.200,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 Orang | 62.160.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu                    |   |  |   |  |   |          |   |               |                                      |  |  |          |               |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota        | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 4 Orang  | - | 12.134.400,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota        | 4 Orang  | 21.815.600,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga |   |  |   |  |   |          |   |               |                                      |  |  |          |               |

|   |    |    |      |      |   |   |  |   |  |   |           |   |               |                                      |  |  |           |               |
|---|----|----|------|------|---|---|--|---|--|---|-----------|---|---------------|--------------------------------------|--|--|-----------|---------------|
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 15 Orang  | - | 39.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang  | 79.815.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  |   |  |   |  |   |           |   |               |                                      |  |  |           |               |
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 150 Orang | - | 18.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang | 19.500.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |   |  |   |  |   |           |   |               |                                      |  |  |           |               |

|   |    |    |      |      |  |   |  |   |  |   |          |   |              |                                      |  |  |          |              |
|---|----|----|------|------|--|---|--|---|--|---|----------|---|--------------|--------------------------------------|--|--|----------|--------------|
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 50 Orang | - | 3.500.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 6.375.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak |   |  |   |  |   |          |   |              |                                      |  |  |          |              |

|   |    |    |      |      |   |   |   |   |  |   |          |   |               |                                      |  |   |          |               |
|---|----|----|------|------|---|---|---|---|--|---|----------|---|---------------|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 35 Orang | - | 3.500.000,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | 35 Orang | 5.000.000,00  |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar |   |   |   |  |   |          |   |               |                                      |  |   |          |               |
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota   | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 25 Orang | - | 30.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota   | 25 Orang | 30.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                      |   |   |   |  |   |          |   |               |                                      |  |   |          |               |

|   |    |    |      |      |  |   |  |   |  |   |           |   |              |                                      |  |  |           |               |
|---|----|----|------|------|--|---|--|---|--|---|-----------|---|--------------|--------------------------------------|--|--|-----------|---------------|
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota     | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 150 Orang | - | 6.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota     | 150 Orang | 16.544.250,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan            |   |  |   |  |   |           |   |              |                                      |  |  |           |               |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota          | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 25 Orang  | - | 5.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota          | 25 Orang  | 7.000.000,00  |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga |   |  |   |  |   |           |   |              |                                      |  |  |           |               |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 5 Orang   | - | 5.050.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang   | 8.250.000,00  |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan                |   |  |   |  |   |           |   |              |                                      |  |  |           |               |

|   |    |    |      |      |   |   |   |   |  |   |          |   |                |                                      |  |   |          |               |
|---|----|----|------|------|---|---|---|---|--|---|----------|---|----------------|--------------------------------------|--|---|----------|---------------|
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota  | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 15 Orang | - | 50.000.000,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 15 Orang | 51.623.200,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 |      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |   |   |   |  |   |          |   | 125.620.000,00 |                                      |  |   |          | 11.900.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0003 | Penyediaan Permakanan   |   |   |   |  |   |          |   |                |                                      |  |   |          |               |
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 15 Orang | - | 113.120.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | 2.000.000,00  |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0004 | Penyediaan Sandang  |   |   |   |  |   |          |   |                |                                      |  |   |          |               |

|   |    |    |      |      |   |   |  |   |  |   |          |   |                  |                                      |  |  |          |                  |
|---|----|----|------|------|---|---|--|---|--|---|----------|---|------------------|--------------------------------------|--|--|----------|------------------|
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 10 Orang | - | 4.500.000,00     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | 2.000.000,00     |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial    |   |  |   |  |   |          |   |                  |                                      |  |  |          |                  |
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                           | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 15 Orang | - | 4.500.000,00     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                           | 15 Orang | 2.300.000,00     |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0013 | Pemberian Layanan Rujukan                                   |   |  |   |  |   |          |   |                  |                                      |  |  |          |                  |
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota   | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | - | 10 Orang | - | 3.500.000,00     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 10 Orang | 5.600.000,00     |
| 1 | 06 | 05 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     |   |  |   |  |   |          |   | 2.505.935.000,00 |                                      |  |  |          | 1.073.925.000,00 |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 |      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |   |  |   |  |   |          |   | 2.505.935.000,00 |                                      |  |  |          | 1.073.925.000,00 |



|   |    |    |      |      |  |   |   |   |  |   |               |   |                  |                                      |  |   |               |                |
|---|----|----|------|------|--|---|---|---|--|---|---------------|---|------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|----------------|
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |   |   |   |  |   |               |   |                  |                                      |  |   |               |                |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata   | - | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng             | - | 21955 Orang   | - | 114.000.000,00   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata   | 21955 Orang   | 70.925.000,00  |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga     |   |   |   |  |   |               |   |                  |                                      |  |   |               |                |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | 6900 Keluarga | - | 1.879.370.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 6900 Keluarga | 953.000.000,00 |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat   |   |   |   |  |   |               |   |                  |                                      |  |   |               |                |
|   |    |    |      |      |  | - | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                              | - | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | 163 Orang     | - | 512.565.000,00   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                              | 163 Orang     | 50.000.000,00  |

|   |    |    |      |      |   |   |   |   |  |   |           |   |                |                                      |  |   |           |                |
|---|----|----|------|------|---|---|---|---|--|---|-----------|---|----------------|--------------------------------------|--|---|-----------|----------------|
| 1 | 06 | 06 |      |      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  |   |   |   |  |   |           |   | 247.734.200,00 |                                      |  |   |           | 705.826.200,00 |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 |      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |   |   |   |  |   |           |   | 224.234.200,00 |                                      |  |   |           | 687.193.700,00 |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan  |   |   |   |  |   |           |   |                |                                      |  |   |           |                |
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  | - | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | 150 Orang | - | 125.394.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  | 150 Orang | 58.224.400,00  |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang  |   |   |   |  |   |           |   |                |                                      |  |   |           |                |
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | 100 Orang | - | 20.916.200,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 9.391.000,00   |

|   |    |    |      |      |   |   |  |   |  |   |           |   |               |                                      |  |  |           |                |
|---|----|----|------|------|---|---|--|---|--|---|-----------|---|---------------|--------------------------------------|--|--|-----------|----------------|
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi   |   |  |   |  |   |           |   |               |                                      |  |  |           |                |
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota  | - | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | 2 Unit    | - | 11.028.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota  | 2 Unit    | 6.317.900,00   |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  |   |  |   |  |   |           |   |               |                                      |  |  |           |                |
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | 250 Orang | - | 63.896.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 250 Orang | 606.440.400,00 |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial  |   |  |   |  |   |           |   |               |                                      |  |  |           |                |
|   |    |    |      |      |   | - | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota  | - | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | 50 Orang  | - | 3.000.000,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota  | 50 Orang  | 6.820.000,00   |
| 1 | 06 | 06 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |   |  |   |  |   |           |   | 23.500.000,00 |                                      |  |  |           | 18.632.500,00  |
| 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          |   |  |   |  |   |           |   |               |                                      |  |  |           |                |

|       |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |          |   |                   |                                      |  |   |          |                  |
|-------|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|----------|---|-------------------|--------------------------------------|--|---|----------|------------------|
|       |  |  |  |  |  | - | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | - | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | 25 Orang | - | 23.500.000,00     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang | 18.632.500,00    |
| TOTAL |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |          |   | 11.540.796.722,00 |                                      |  |   |          | 9.323.944.594,00 |

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2025 penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026. Target kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam RPD berkaitan dengan Tingkat Kinerja dan rencana tindak lanjut Dinas Sosial Tahun 2024 – 2026 yaitu :

1. Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnyasecara wajar
3. Terwujudnya kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat.
4. Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur.
6. Meningkatnya prasarana dan sarana aparatur yang memadai.
7. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
8. Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana
9. Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana.
10. Terwujudnya ketaatan dan kepatuhan aparat serta mitra kerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntable dan bebas dari unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Palangka Raya, Oktober 2024

Kepala Dinas Sosial  
Kota Palangka Raya



H.RIDUAN, A.Md.Kep., SKM.M.M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711206 199403 1 006

LAMPIRAN

1.1

Rencana Aksi Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2025

| NO                  | TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SOPD |                   |   |                        |                     |                     |                     |     | PROGRAM | KEGIATAN                    | PAGU | RENCANA AKSI TAHUN 2024  |             |            |            |            |            |
|---------------------|---|-------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|---------|-----------------------------|------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | URAIAN SASARAN                                    | INDIKATOR SASARAN | SATUAN  | TARGET AWAL RPJMD 2023 | TARGET CAPAIAN 2024 | TARGET CAPAIAN 2025 | TARGET CAPAIAN 2026 |     |         |                             |      |  |             |            |            |            |            |
| URUSAN PEMERINTAHAN |   |                   |   |                        |                     |                     |                     |     |         |                             |      | TRIWULAN   |             |            |            |            |            |
| SOSIAL              |   |                   |   |                        |                     |                     |                     |     |         |                             |      | I  | II          | III        | IV         |            |            |
| 1                   | Meningkatnya Penanganan PPKS                      | 1                 | Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS | Persentase (%)         | 100                 | 100                 | 100                 | 100 | 1       | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1    | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                      | 21.900.000  | 5.475.000  | 5.475.000  | 5.475.000  | 5.475.000  |
|                     |   |                   |   |                        |                     |                     |                     |     |         |                             | 2    | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 227.515.200 | 56.878.800 | 56.878.800 | 56.878.800 | 56.878.800 |

|  |  |   |   |                |     |     |     |     |   |   |   |   |               |               |               |            |            |
|--|--|---|---|----------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|  |  | 2 | Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                           | Persentase (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL             | 3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 273.583.200   | 68.395.800    | 68.395.800    | 68.395.800 | 68.395.800 |
|  |  |   |   |                |     |     |     |     |   |   | 4 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial                   | 18.551.000    | 4.637.750     | 4.637.750     | 4.637.750  | 4.637.750  |
|  |  | 3 | Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial                        | Persentase (%) | 8.5 | 9   | 9.5 | 10  | 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 5 | Pemeliharaan Anak-anak Terlantar  | 15.000.000    | 5.000.000     | 5.000.000     | 3.000.000  | 2.000.000  |
|  |  |   |   |                |     |     |     |     |   |   |   | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | 1.170.500.000 | 70.500.000    | 1.456.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
|  |  | 4 | Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persentase (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA              | 6 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota   | 1.096.764.915 | 1.000.000.000 | 50.000.000    | 46.000.000 | 6.967.445  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |               |            |            |            |            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | Penyelenggaraan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>terhadap<br>kesiapsiagaan<br>Bencana<br>Kabupaten/Kota | 70.451.372    | 17.612.843 | 17.612.843 | 17.612.843 | 17.612.843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | JUMLAH  | 2.894.265.687 |            |            |            |            |



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS SOSIALKOTA PALANGKARAYA  
TAHUN 2025

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                                      |  |  | Kelompok Sasaran                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas  |  |                                     | Target                       | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | Nasional   | Daerah   |                                     |                              |                     |                                   |  |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12   | 13   | 14                                  | 15                           | 16                  | 17                                |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Sosial   |  |                                  |  |   |  | 11.435.996.722,00   |  |                                      |  |  |                                     |                              | 9.323.944.594,00    |                                   |  |  |  |  |  |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |  |                                  |  |   |  | 11.435.996.722,00   |  |                                      |  |  |                                     |                              | 9.323.944.594,00    |                                   |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 06 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                |  |                                  |  |   |  | 11.435.996.722,00   |  |                                      |  |  |                                     |                              | 9.323.944.594,00    |                                   |  |  |  |  |  |
| 1  | 1    | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan  | 100 %                            |  |   | 100 %                                  | 7.783.946.922,00    |  |                                      |  |  |                                     | 100 %                        | 6.879.859.744,00    |                                   |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah<br>Persentase terpenuhinya dokumen SAKIP yang memadai | 100%                             |  |   | 100 %<br>100 %                         | 54.991.119,00       |  |                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan<br>Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya | 100%                         | 35.756.500,00       |                                   |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |  |  |                                     |                              |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 24 Dokumen                       |  |   | 3 Dokumen                              | 27.691.119,00       | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan<br>Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya | 8 Dokumen                    | 15.000.000,00       | DINAS SOSIAL                      |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |  |  |                                     |                              |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 9 Laporan                        |  |   | 3 Laporan                              | 27.300.000,00       | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                     | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan<br>Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya | 3 Laporan                    | 20.756.500,00       | DINAS SOSIAL                      |  |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|  |   |    |    |      |      |   |  |            |  |   |                  |                |   |                                      |  |   |                                     |            |                |              |
|--|---|----|----|------|------|---|--|------------|--|---|------------------|----------------|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|
|  |   |    |    |      |      |   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit     |  |   | 1 Unit           | 20.000.000,00  | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya | 0 Unit     | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
|  | 1 | 06 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | -  | 100%       |  | - | 1.016.095.600,00 |                |   |                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya | 100%       | 541.948.400,00 |              |
|  | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |            |  |   |                  |                |   |                                      |  |   |                                     |            |                |              |
|  |   |    |    |      |      |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 36 Laporan |  |   | 12 Laporan       | 136.795.600,00 | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya | 12 Laporan | 73.142.400,00  | DINAS SOSIAL |
|  | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   |  |            |  |   |                  |                |   |                                      |  |   |                                     |            |                |              |
|  |   |    |    |      |      |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 36 Laporan |  |   | 12 Laporan       | 879.300.000,00 | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya | 12 Laporan | 468.806.000,00 | DINAS SOSIAL |

|   |   |    |    |      |      |   |  |         |  |  |         |                |  |                                      |  |   |                                     |         |                |              |
|---|---|----|----|------|------|---|--|---------|--|--|---------|----------------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------|----------------|--------------|
|   | 1 | 06 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -  | 100%    |  |  | -       | 458.556.300,00 |  |                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya | 100%    | 247.944.519,00 |              |
|   | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 27 Unit |  |  | 9 Unit  | 331.306.300,00 | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya | 9 Unit  | 199.751.000,00 | DINAS SOSIAL |
|   | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 6 Unit  |  |  | 2 Unit  | 80.000.000,00  | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya | 2 Unit  | 30.000.000,00  | DINAS SOSIAL |
|   | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 36 Unit |  |  | 12 Unit | 47.250.000,00  | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya | 12 Unit | 18.193.519,00  | DINAS SOSIAL |
| 2 | 1 | 06 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL   | Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS  | 80 %    |  |  | 80 %    | 509.650.000,00 |  |                                      |  |   |                                     | 80 %    | 104.050.600,00 |              |

[illegible]



|   |   |    |    |      |      |  |   |             |  |  |  |            |                |  |                                      |  |   |   |            |                |              |
|---|---|----|----|------|------|--|---|-------------|--|--|--|------------|----------------|--|--------------------------------------|--|---|---|------------|----------------|--------------|
|   |   |    |    |      |      |  | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang    |  |  |  | 0 Orang    | 0,00           | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Palangka Raya | 5 Orang    | 18.500.000,00  | DINAS SOSIAL |
|   | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   |   |             |  |  |  |            |                |  |                                      |  |   |   |            |                |              |
|   |   |    |    |      |      |  | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | 210 Lembaga |  |  |  | 87 Lembaga | 340.500.000,00 | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Palangka Raya | 70 Lembaga | 50.000.000,00  | DINAS SOSIAL |
| 3 | 1 | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | Persentase PPKS SPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya   | 100 %       |  |  |  | 100 %      | 676.994.400,00 |  |                                      |  |   |   | 100 %      | 560.283.050,00 |              |
|   | 1 | 06 | 04 | 2.01 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantl Sosial | -   | 100%        |  |  |  | -          | 661.644.400,00 |  |                                      | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM             | 100%       | 548.383.050,00 |              |
|   | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanaan   |   |             |  |  |  |            |                |  |                                      |  |   |   |            |                |              |
|   |   |    |    |      |      |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota      | 345 Orang   |  |  |  | 115 Orang  | 476.300.000,00 | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM             | 115 Orang  | 240.300.000,00 | DINAS SOSIAL |
|   | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang   |   |             |  |  |  |            |                |  |                                      |  |   |   |            |                |              |

|  |   |    |    |      |      |   |  |           |  |  |           |               |  |  |  |   |   |           |               |              |
|--|---|----|----|------|------|---|--|-----------|--|--|-----------|---------------|--|--|--|---|---|-----------|---------------|--------------|
|  |   |    |    |      |      |   | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 180 Orang |  |  | 60 Orang  | 12.160.000,00 | Kota Palangkaraya,<br>Jekan Raya,<br>Menteng | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI<br>UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM | 60 Orang  | 62.160.000,00 | DINAS SOSIAL |
|  | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu   |  |           |  |  |           |               |  |  |  |   |   |           |               |              |
|  |   |    |    |      |      |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota        | 12 Orang  |  |  | 4 Orang   | 12.134.400,00 | Kota Palangkaraya,<br>Jekan Raya,<br>Menteng | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI<br>UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM | 4 Orang   | 21.815.600,00 | DINAS SOSIAL |
|  | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  |  |           |  |  |           |               |  |  |  |   |   |           |               |              |
|  |   |    |    |      |      |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                           | 45 Orang  |  |  | 15 Orang  | 40.000.000,00 | Kota Palangkaraya,<br>Jekan Raya,<br>Menteng | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI<br>UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM | 15 Orang  | 79.815.000,00 | DINAS SOSIAL |
|  | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  |  |           |  |  |           |               |  |  |  |   |   |           |               |              |
|  |   |    |    |      |      |   | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                           | 450 Orang |  |  | 150 Orang | 18.000.000,00 | Kota Palangkaraya,<br>Jekan Raya,<br>Menteng | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI<br>UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM | 150 Orang | 19.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
|  | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |  |           |  |  |           |               |  |  |  |   |   |           |               |              |

[illegible]

|  |   |    |    |      |      |   |  |          |  |  |          |               |  |                                      |  |   |   |          |               |              |
|--|---|----|----|------|------|---|--|----------|--|--|----------|---------------|--|--------------------------------------|--|---|---|----------|---------------|--------------|
|  |   |    |    |      |      |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota          | 75 Orang |  |  | 25 Orang | 5.000.000,00  | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM | 25 Orang | 7.000.000,00  | DINAS SOSIAL |
|  | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  |  |          |  |  |          |               |  |                                      |  |   |   |          |               |              |
|  |   |    |    |      |      |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang |  |  | 5 Orang  | 5.050.000,00  | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM | 5 Orang  | 8.250.000,00  | DINAS SOSIAL |
|  | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan   |  |          |  |  |          |               |  |                                      |  |   |   |          |               |              |
|  |   |    |    |      |      |   | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                     | 45 Orang |  |  | 15 Orang | 50.000.000,00 | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM | 15 Orang | 51.623.200,00 | DINAS SOSIAL |
|  | 1 | 06 | 04 | 2.02 |      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | -  | 100%     |  |  | -        | 15.350.000,00 |  |                                      | -  | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)     | 100%     | 11.900.000,00 |              |
|  | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0003 | Penyediaan Permakanan   |  |          |  |  |          |               |  |                                      |  |   |   |          |               |              |

|   |   |    |    |      |      |  |   |          |  |  |          |                  |   |                                      |   |   |   |          |                  |              |
|---|---|----|----|------|------|--|---|----------|--|--|----------|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|----------|------------------|--------------|
|   |   |    |    |      |      |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 45 Orang |  |  | 15 Orang | 7.350.000,00     | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 15 Orang | 2.000.000,00     | DINAS SOSIAL |
|   | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0004 | Penyediaan Sandang                                       |   |          |  |  |          |                  |   |                                      |   |   |   |          |                  |              |
|   |   |    |    |      |      |  | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          | 30 Orang |  |  | 10 Orang | 0,00             | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 10 Orang | 2.000.000,00     | DINAS SOSIAL |
|   | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |   |          |  |  |          |                  |   |                                      |   |   |   |          |                  |              |
|   |   |    |    |      |      |  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | 45 Orang |  |  | 15 Orang | 4.500.000,00     | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 15 Orang | 2.300.000,00     | DINAS SOSIAL |
|   | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0013 | Pemberian Layanan Rujukan                                |   |          |  |  |          |                  |   |                                      |   |   |   |          |                  |              |
|   |   |    |    |      |      |  | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 30 Orang |  |  | 10 Orang | 3.500.000,00     | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 10 Orang | 5.600.000,00     | DINAS SOSIAL |
| 4 | 1 | 06 | 05 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                  | Persentase PPKS yang mandiri  | 3,6 %    |  |  | 3,6 %    | 2.247.767.400,00 |   |                                      |   |   |   | 3,6 %    | 1.073.925.000,00 |              |

|   |   |    |    |      |      |   |  |       |  |  |               |                  |  |                                      |   |   |                                  |               |                  |              |
|---|---|----|----|------|------|---|--|-------|--|--|---------------|------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|---------------|------------------|--------------|
|   | 1 | 06 | 05 | 2.02 |      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | -  | 45%   |  |  | -             | 2.247.767.400,00 |  |                                      | - | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Fakir Miskin & Orang Tidak Mampu | 45%           | 1.073.925.000,00 |              |
|   | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  |  |       |  |  |               |                  |  |                                      |   |   |                                  |               |                  |              |
|   |   |    |    |      |      | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata   | 21955 Orang  |       |  |  | 21955 Orang   | 114.000.000,00   | Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Fakir Miskin & Orang Tidak Mampu | 21955 Orang   | 70.925.000,00    | DINAS SOSIAL |
|   | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga  |  |       |  |  |               |                  |  |                                      |   |   |                                  |               |                  |              |
|   |   |    |    |      |      | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 20700 Keluarga   |       |  |  | 6900 Keluarga | 1.600.167.400,00 | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Fakir Miskin & Orang Tidak Mampu | 6900 Keluarga | 953.000.000,00   | DINAS SOSIAL |
|   | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat  |  |       |  |  |               |                  |  |                                      |   |   |                                  |               |                  |              |
|   |   |    |    |      |      | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                              | 30 Orang   |       |  |  | 220 Orang     | 533.600.000,00   | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan Menurunnya Kemiskinan (M2S4) | Fakir Miskin & Orang Tidak Mampu | 10 Orang      | 50.000.000,00    | DINAS SOSIAL |
| 5 | 1 | 06 | 06 |      |      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | Persentase Korban Bencana yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya | 100 % |  |  | 100 %         | 217.638.000,00   |  |                                      |   |   |                                  | 100 %         | 705.826.200,00   |              |

[illegible]

[illegible]